

 <p style="text-align: center;">PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS 1A SERANG Jl. Raya Serang-Pandeglang KM.06 Telp: (0254) 7914504 Fax: (0254) 7914503 Email : pnserang12@gmail.com Website : www.pn-serang.go.id</p>	NOMOR SOP	W29.U1/04/SOP/PHI/VIII/2022
	TGL. PEMBUATAN	8 Agustus 2022
	TGL. REVISI	11 Agustus 2022
	TGL. EFEKTIF	11 Agustus 2022
	DISAHKAN OLEH	KETUA PN. SERANG
	 TOTOK SAPTO INDRATO PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	
	NAMA SOP	PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)
DASAR HUKUM:		KETERKAITAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kepaniteraan Hubungan Industrial 2. SOP Pengembalian Sisa Panjar 3. SOP Eksekusi Perdata
		PERINGATAN/CATATAN:
		Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian perkara Kasasi PHI tidak dapat diselesaikan dengan baik
		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SMU Sederajat
		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer 3. Printer 4. Aplikasi SIPP 5. Register Induk 6. Buku Referensi
		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Register Induk Pendaftaran Perjanjian Bersama PHI

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PTSP	MEJA II	PANMUD PHI	PANITERA	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima permohonan pendaftaran perjanjian bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi		Tidak			<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan pendaftaran perjanjian bersama - Perjanjian bersama - Surat kuasa jika ada - Checklist - ATK 	10 Menit	Berkas permohonan dan berkas persyaratan	
2	Meneiti permohonan pendaftaran perjanjian bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi			Ya		<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan pendaftaran perjanjian bersama - Perjanjian bersama - Surat kuasa jika ada - Checklist - ATK 	15 Menit	Berkas permohonan lengkap	
3	Menginput permohonan pendaftaran perjanjian bersama dalam SIPP dan mencatat dalam Register Perjanjian Bersama					<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan pendaftaran perjanjian bersama - SIPP - Register - ATK 	10 Menit	Permohonan pendaftaran perjanjian bersama terinput dalam SIPP dan tercatat pada Register	
4	Pembuatan konsep Akta Bukti pendaftaran perjanjian bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi			Tidak		<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan lengkap - ATK 	10 Menit	Konsep Akta pendaftaran yang sudah diparaf oleh Panmud PHI	
5	Meneiti dan membubuhkan tanda tangan pada konsep Akta Bukti pendaftaran perjanjian bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi			Ya		Konsep Akta pendaftaran yang sudah diparaf oleh Panmud PHI	15 Menit	Akta Bukti pendaftaran perjanjian bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi	
6	Memungut dan menyeter PNBP kepada bendahara penerima					<ul style="list-style-type: none"> - Tanda terima pembayaran PNBP - Register Penerimaan PNBP 	10 Menit	Tanda terima penyeteran PNBP dari bendahara penerima	
7	Menyerahkan salinan Akta Bukti pendaftaran perjanjian bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi					<ul style="list-style-type: none"> - Salinan Akta - Buku ekspedisi - ATK 	15 Menit	Tanda terima penyerahan salinan	
8	Mengarsipkan berkas permohonan bukti pendaftaran perjanjian bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi					<ul style="list-style-type: none"> - Berkas lengkap - SIPP - ATK 	15 Menit	Berkas telah diarsipkan dengan baik	